

Berita : Pemkab Sanggup Beri Rp 2 Juta

Entitas / Cakupan : Kabupaten Garut

Sumber / Hal : Tribun Jabar / Hal.9

Edisi : Kamis, 27 September 2018

Pemkab Sanggup Beri Rp 2 Juta

■ Untuk Gaji Honorer per Bulan ■ Jika Jadi P3K

GARUT, TRIBUN - Surat keputusan (SK) penugasan untuk guru honorer di Kabupaten Garut masih dalam proses verifikasi. Menurut data sementara yang dikumpulkan pemkab, ada sekitar 7 ribu guru honorer yang kemungkinan mendapat SK.

"Masih diverifikasi sama Disdik (Dinas Pendidikan, Red)," ujar Bupati Garut, Rudy Gunawan, Rabu (26/9).

Hasil verifikasi nantinya akan dibagi menjadi tiga kelompok guru honorer, yakni honorer yang diangkat sebelum tahun 2005, honorer yang diangkat setelah tahun 2005, dan honorer sebelum tahun 2013.

Selain untuk keperluan SK penugasan, hasil verifikasi juga untuk pengangkatan guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

"Kami siapkan untuk pengangkatan honorer jadi P3K ini. Kami ini sangat menghargai jasa-jasa guru," ucapnya.

Rudy menambahkan, pemkab sanggup menggaji honorer yang

Ada 7.000 Lebih Honorer

- Pemkab Garut masih memverifikasi jumlah honorer.
- Data sementara, ada 7.000 lebih honorer.
- Mereka bakal diberi SK Penugasan.
- Verifikasi juga untuk pengangkatan honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
- Jika jadi P3K pemkab sanggup menggaji Rp 2 juta per bulan.
- Tiap tahun 1.000 P3K diangkat.

menjadi P3K sebesar Rp 2 juta per bulan. Upah tersebut diberikan untuk kesejahteraan honorer.

"Tapi P3K ini masih tunggu peraturan pemerintahnya. Sampai sekarang belum ada," katanya.

Setiap tahun Rudy siap mengangkat seribu honorer menjadi P3K. Jumlah tersebut disanggupi Rudy karena anggaran Pemkab Garut memadai.

"Rencananya kalau peraturannya sudah ada (terkait pengangkatan P3K) setiap tahun kami angkat para guru honorer ini secara bertahap," ujarnya.

Rudy sudah mengintruksikan kepada Wakil Bupati Garut, Plt Kadisdik, dan anggota DPRD untuk menanyakan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait SK penugasan.

Hal itu dilakukan untuk memastikan SK yang dikeluarkan Disdik bisa digunakan.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Garut, Asep D Maman, mengatakan, DPRD dan Pemkab Garut akan menindaklanjuti SK penugasan ke Kemendikbud. Pihaknya ingin memastikan SK yang dikeluarkan dinas bisa digunakan.

"Kalau sudah ada kepastian dari Kemendikbud nantinya para guru honorer tidak akan merasa kecewa dengan SK penugasan yang mereka kantong, meski hanya dari Disdik," katanya. (firman wijaksana)